

Increasing Literacy and Education Beginner Voter

Dedi Kurniawan^{1*}

¹ Panitia Pengawas Pemilu

*Correspondence Author: dedi0944@gmail.com

Abstract

General elections are a democratic process that cannot be separated from community involvement in determining legislative and executive leaders. The achievement of democracy is certainly inseparable from various elements of society, one of which is novice voters. The limitations of beginner voters to literacy and education about elections, such as not being registered in the Permanent Voter List (DPT), are a bad sign. The research conducted is field research, with a descriptive qualitative approach. The data collection technique in this research is Focus Group Discussion (FGD) with election officers and 6 Secondary Level Schools located in Siak Regency, Kandis sub-district namely Sultan Syarif Kasim SMKS, Baitul Rahman SMKS, Ponpes jabalnur, ponpes darus shofa, SMAN 3 Kandis, SMAN 1 Kandis. In Siak district there are novice voters who are classified as generation Z totaling 87.575 (born in 1997-2012)/26.88%. The results showed that novice voters who lack literacy and education have not been selective in obtaining information about elections through various media. On the other hand, there are still beginner voters in six secondary schools who are still not registered in the permanent voter list. This shows that beginner voters who already have the right to vote can lose their right to vote due to limited information and knowledge.

Keywords: Literacy; Education; Beginner Voters

1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan proses politik untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan politik di Lembaga eksekutif maupun legislatif. Kemampuan literasi menjadi penting bagi pemilih pemula dalam masa pemilu, misalnya untuk mencari dan memahami informasi tentang pemilu. Pemilih pemula dapat memanfaatkan keberadaan media sosial dan berbagai situs lain sebagai sumber informasi terkait Pemilu 2024, misalnya melalui platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, website KPU, dan lain sebagainya. Kendati ada kemudahan, informasi yang tersebar dalam media sosial sangat beragam dan berjumlah banyak. Tidak semua informasi yang didapatkan melalui sosial media dapat membantu kebutuhan pemilih pemula. Selain itu, pemilih pemula juga dihadapkan pada ancaman hoax (Agatha dkk, 2021).

Terkait preferensi kanal media massa, ditemukan bahwa sebanyak 71.9% responden paling sering mencari informasi lewat media

online atau internet. Pada urutan kedua, muncul televisi sebagai kanal media massa yang paling sering diakses (60.9%). Pada urutan ketiga (37.7%) dan keempat (39.4%), responden menyebutkan bahwa mereka paling sering mengakses radio (Agatha dkk, 2021).

Edukasi menurut KBBI adalah perihal pendidikan. Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia. Edukasi dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Suara pemilih pemula ini juga rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang sering menggunakan kampanye hitam untuk mendulang suara karena mereka belum memiliki literasi politik yang memadai dan cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. Di tataran desa yang notabene tidak tersentuh sama sekali meskipun sudah ada himbuan dari KPU Pusat hingga Kabupaten atau Kota untuk melakukan sosialisasi. Suara milenial mempunyai sumbangsih yang cukup besar

pada Pemilu tahun 2019 bahkan disinyalir suara ini mampu mendudukkan 25 anggota dewan di kursi DPR RI, sehingga banyak oknum dan peserta Pemilu yang menggunakan segala cara untuk merebut simpati kaum milenial. Di satu sisi, orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada, sehingga urgent sekali edukasi politik bagi mereka agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tidak bersifat pragmatis (Setyowati Karyaningt, 2019).

Menurut Undang-undang No 10 tahun 2008 dalam Bab IV Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemugutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau pernah kawin yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang pemilu. Selain itu, pemilih pemula juga disematkan pada anggota TNI Polri yang sudah pensiun. Hal ini didasarkan pada pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan bahwa "Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Kemudian, disebutkan juga bahwa anggota polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" (Setyowati Karyaningt, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Akhyar Anshori, Rudianto dan Jehan Ridho Izharsyah, 2023. Hasil penelitian yang dilakukan terkait literasi politik bagi pemilih pemula terhadap penanganan informasi hoax menghadapi pemilu 2024 yang telah dilakukan terhadap 400 orang responden berdasarkan hasil uji linear sederhana berganda, uji t (parsial), uji F serta uji Koefisien Determinasi (R²) ditemukan bahwa sikap responden terhadap penanganan informasi hoax adalah sebesar

20,314 satuan dimana adanya kontribusi positif dari literasi politik terhadap penanganan informasi hoax serta adanya kontribusi positif dari persepsi responden tentang pemilu tahun 2024 terhadap penanganan informasi hoax. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa terdapatnya pengaruh antara literasi politik terhadap pengendalian informasi hoax yang membuktikan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, serta adanya hubungan antara pemahaman pemilu terhadap pengendalian informasi hoax yang berarti bahwa H2 diterima dan H0 ditolak. Terkait dengan hubungan simultan antara literasi politik dan pemahaman pemilu terhadap pengendalian informasi hoax, hasil penelitian menemukan bahwa H3 diterima dan H0 ditolak dengan nilai hubungan sebesar 11,2%. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kendala di lapangan, seperti proses pelaksanaan pemilu 2024 yang masih sekitar satu tahun lebih, belum sepenuhnya dipahami oleh para responden. Sehingga diharapkan kedepannya para peneliti yang tertarik mengangkat kajian tentang literasi politik dapat melakukannya di tengah-tengah pelaksanaan kampanye tahun 2024.

Di Indonesia sendiri, informasi hoax paling banyak tersebar melalui platform media sosial, khususnya melalui media sosial WhatsApp. Dimana pengguna media sosial WhatsApp di Indonesia berjumlah 83% (Riyanto, 2020). Bahkan dalam hal menggali informasi seputar politik, 16,8% pemilih pemula menggunakan media sosial dalam mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan politik (Bakti et al., 2012). Banyaknya berita hoax seputar politik yang beredar membawa pengaruh kepada para pemilih pemula, dampak nyatanya adalah mudahnya tersulut provokasi, adanya saling membenci karena perbedaan pilihan politik, dan terjadinya perubahan pilihan atau dukungan yang

didasarkan oleh pilihan yang irasional (Aminah & Sari, 2019).

Penelitian yang ditulis oleh Ulya Fitri, Novi Budiman and Rio Febrian dengan pembahasan Partisipasi dan Perilaku Politik Generasi Millennial pada Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2020 di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi generasi milenial adalah masih tergolong rendah, sedangkan perilaku politik generasi milenial lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan rasional. Pemilih generasi milenial di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas sudah mandiri secara sosial dalam menentukan pilihan tanpa perlu dipengaruhi teman maupun orang tua, namun cukup tinggi dalam mempertimbangkan aspek agama kandidat Bupati Tanah Datar tahun 2020. Secara psikologis mereka tidak lagi melihat unsur materi dan aspek lahiriah lainnya, namun sudah lebih dalam melihat visi misi kandidat, peningkatan ekonomi, penegakan hukum dan rekam jejak kandidat. Pemilih milenial di Saruaso Tanah Datar sudah mapan dalam aspek pilihan rasional (Ulya Fitri, dkk, 2021).

2. Perspektif Teoritis Literasi

Menurut Tompkins (1991:18) (dalam Yanida, 2021), literasi yaitu kemampuan menggunakan membaca dan menulis dalam melaksanakan tugas-tugas yang bertalian dengan dunia kerja dan kehidupan diluar sekolah. Membahas mengenai literasi bagi pemilih pemula, perlu adanya literasi politik. Literasi politik merupakan upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk membangun kepekaan masyarakat terhadap semua informasi dan isu politik yang sedang berkembang. (Akhyar dkk, 2023). Menurut Bernard Crick (dalam Nora Eka Putri, 2017), literasi politik merupakan pemahaman praktis tentang konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bahasa. Mengenai literasi

politik ini juga dijelaskan oleh Jenni S Bev sebagai keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Adapun yang menjadi muatan pokok literasi politik diantaranya yaitu Partisipasi politik.

Partisipasi politik warga dapat dibedakan kepada beberapa kategori diantaranya yaitu (i) Dilihat dari kegiatannya yang terdiri dari partisipasi politik aktif dan pasif. Dapat dikatakan politik aktif jika warganya terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pemerintah, dll. Sedangkan partisipasi politik dikatakan pasif apabila kegiatan yang mencerminkan kekuatan terhadap keputusan pemerintah. (ii) Dilihat dari tingkatannya. Dapat dibedakan menjadi apatis, spectator dan gladiator. Apatis yaitu tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kegiatan politik dan bersikap masa bodoh. Spectator artinya warga yang bersangkutan terlibat atau ikut memilih dalam pemilu. Sedangkan gladiator artinya berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. (iii) Partisipasi dibedakan atas jumlah ada yang bersifat kolektif dan lainnya individual. (iv) Dilihat dari tinggi rendahnya partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif; partisipasi apatis (ada kepercayaan kepada politik namun kurang percaya pada system yang ada); partisipasi militant radikal (kepercayaan kepada politik tinggi namun percaya kepada sistem rendah); partisipasi tidak aktif (kesadaran politik rendah, namun percaya kepada system politik sangat tinggi). Pemahaman Kritis Warga atas hal-hal pokok terkait politik.

Hal ini terkait dengan pemahaman warga mengenai politik dan aspek-aspek yang berhubungan dengan politik itu sendiri. Konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian dan alokasi merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh warga untuk berpartisipasi aktif dalam politik (Nora Eka Putri, 2017). Selain

literasi politik, hal lain yang dapat menunjang atau berperan penting dalam pemilih pemula yaitu literasi informasi. Literasi informasi berperan menjadi keterampilan yang dikuasai masing-masing individu. Literasi ini menjadi modal yang perlu dimiliki karena keterampilan ini membantu manusia untuk mencapai hidup yang lebih berkualitas dan lebih produktif. Istilah literasi informasi atau *information literacy* pertama kali dikemukakan oleh Paul Zurkowski pada tahun 1974. Zurkowski mengemukakan perlunya kemampuan seseorang dalam menggunakan alat-alat bantu pencarian informasi dan sumber-sumber informasi primer untuk memecahkan masalah (Lis Setyowati).

Dalam memahami literasi bagi pemilih pemula, juga perlu membahas tentang kompetensi literasi media digital bagi pemilih pemula. Bicara mengenai kemampuan literasi media digital dalam wilayah politik dapat dilihat dari kompetensi individu (*Individual Competence*) terkait informasi-informasi yang diterima para pemilih pemula selama masa kampanye pemilu. Menurut Lutviah (dalam Tri Wahyuti, 2019), *Individual Competence* merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan media. Diantaranya kemampuan untuk menggunakan, memproduksi, menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan melalui media.

Masyarakat dianggap memiliki kompetensi personal ketika mampu membedakan isu terkait kampanye politik apakah masuk dalam kategori fakta atau hoaks. Ada beberapa cara mudah untuk mengetahui apakah berita yang diterimanya masuk dalam kategori hoaks, seperti yang dikutip dalam buku saku yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), tahun 2018 (dalam Tri Wahyuti, 2019), diantaranya yaitu: (a) Telusuri dari sumber berita atau dimain situs. (b) Bersikap kritis pada setiap berita yang diterima terutama terkait penyebar informasi untuk melakukan

konfirmasi atas informasi yang dikirim. (c) Perhatikan informasi waktu, tempat, lokasi pemberitaan yang tidak jelas dan kutipan berita yang mencatat nama tokoh palsu. (d) Masyarakat diminta untuk kritis pada isi berita apakah lebih banyak mengisahkan opini seseorang atau mengemukakan fakta. (e) Masyarakat juga harus membedakan fakta dengan melihat apakah pemaparan yang disampaikan terdengar mustahil atau justru ditunjang dengan penelitian palsu untuk memperkuat argument yang disampaikan. (f) Masyarakat juga harus kritis ketika melihat tampilan desain halaman yang aneh, misalnya menggunakan huruf besar dan tanda seru dimana didalam isi pemberitaannya banyak menggunakan kata heboh dan cenderung provokatif karena berita palsu (hoaks) sengaja dibuat untuk menimbulkan kehebohan dan kekacauan publik.

Literasi media merupakan seperangkat perspektif yang digunakan secara aktif saat mengakses media masa untuk menginterpretasikan pesan yang dihadapi. (Darwis, dkk, 2019). Literasi media juga dapat diartikan sebagai skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain.

Edukasi

Edukasi adalah proses kegiatan belajar setiap individu atau kelompok yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari pola pikir, pengetahuan serta mengembangkan potensi dari masing-masing individu. Proses edukasi ini dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan proses belajar. Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. (Meilaty, dkk, 2020).

Edukasi dapat dikatakan sebagai suatu proses pembelajaran yang berlangsung pada masyarakat baik secara formal maupun informal dan bertujuan untuk mendidik, mentransfer ilmu pengetahuan dan

mengembangkan daya diri melalui berbagai proses pembelajaran (Andi, dkk, 2023).

Edukasi merupakan sebuah proses pembelajaran yang terjadi pada diri manusia baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, dan mengembangkan potensi dalam diri melalui serangkaian proses pembelajaran. Metode pendidikan/ edukasi digolongkan menjadi 3 bagian yaitu, metode berdasarkan pada pendekatan perseorangan, metode berdasarkan pendekatan kelompok, dan metode berdasarkan pada pendekatan massa (Andi, dkk, 2023).

Pemilih pemula umumnya merujuk kepada kelompok pemilih muda yang baru pertama kali mengikuti pemilu. Oleh karena itu, pemilih pemula cenderung belum sepenuhnya mengenal lingkungan politik. Kelompok pemilih pemula ini sangat rawan dipolarisasi dan diintervensi oleh kelompok berkepentingan untuk politik praktis (Ihyani, dkk, 2020).

Adapun dalam era digital terkini, penyebaran informasi dan opini dapat dengan mudah tersebar melalui media sosial dan internet. Apabila tidak dibekali pengetahuan yang cukup, maka pemilih pemula akan sangat mudah terpengaruh oleh konten-konten radikal dan berita hoaks. Maka dari itu sangat penting untuk memberikan edukasi politik agar para pemilih pemula tidak menjadi apatis terhadap politik itu sendiri. Sejumlah strategi yang dapat digunakan antara lain dengan sosialisasi edukatif serta melibatkan para pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif (Grace, dkk. 2023).

Edukasi politik dapat membentuk individu yang sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang dapat bertanggung jawab secara moral dalam mewujudkan tujuan politik terhadap generasi muda (Sartibi, dkk, 2019).

Pemilih Pemula

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih yang sangat menarik untuk diamati dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula (Nur Wardhani, 2018). Menurut UU No 7 tahun 2017, pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap berumur 17 tahun atau lebih/ sudah kawin, kemudian pasal 199 UU No.7 tahun 2017 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pilkada dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. (Aprianti, 2023). Sedangkan, menurut undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa pemilih pemula adalah mereka yang baru pertama kali untuk memilih dan telah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum (dan Pemilu) (Rahmat & Esther, 2016).

Pemilih pemula secara umum mereka para pelajar, mahasiswa serta pekerja yang berusia muda. Perlu adanya pendidikan politik agar pemilih pemula berkembang menjadi warga Negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dari bangsanya dan sadar akan kewajiban dalam kerangka nilai-nilai yang mbingkainya (Prasetyo et al., 2019). Jadi, pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya (Rohmayani et al., 2021). Cara berperilaku pemilih pemula adalah indikasi penting dari sifat sistem demokrasi saat ini dan nanti. Karena kondisinya masih goyah dan masih terpengaruh oleh lingkaran kelompok

ideologis dan partai politik (Fatimah et al., 2023).

Pemilih pemula merupakan subjek dalam kegiatan politik, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya kedepan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum (Aprianti, 2023).

Pemilih pemula menjadi bagian yang tidak dapat di tinggalkan dalam mewujudkan kualitas demokrasi yang terjadi lewat pemilu. Prediksi Komisi Pemilihan Umum, hampir 60% pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang termasuk dalam kategori pemilih Muda. Dimana diantaranya sekitar 22% nya adalah pemilih pemula. Pemilih pemula dikaitkan sebagai pemilih yang baru pertama kali atau belum lebih 2 kali menjadi pemilih dalam pemilu nasional di Indonesia, dalam artian, pemilih pemula ini berusia sekitar 17-25 Tahun (Anshori & Izharsyah, 2024).

Menurut Pahmy Sy. ciri-ciri pemilih pemula sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dari pemungutan suara sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

2. Baru mengikuti pemilu, memberikan hak pilihannya pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemilih pemula kerap menampilkan sisi yang unik, sering kali memunculkan kejutan dan akan menjanjikan secara kuantitas. Pemilih pemula dengan antusiasme tinggi akan relatif rasional haus akan perubahan yang

positif (Prasetyo et al., *Lo. Cit.*, 2019). Dimana pemilih pemula bukan saja menjadi objek dalam kegiatan pemilu, tetapi pada dasarnya, pemilih pemula harus di jadikan subjek guna terciptanya hasil dari proses demokrasi yang baik demi kemajuan Indonesia ke depannya. Pemilih pemula memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan proses demokrasi di Indonesia. (Anshori & Izharsyah, 2024).

3. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian yang dilakukan akan memberikan gambaran suatu kejadian, fenomena dalam rangka menganalisis dan menemukan konteks yang sesungguhnya (Yusuf, 2014). Penelitian ini akan memberikan deskripsi atau peristiwa, kejadian, tanpa membandingkan antar variabel. Sumber Informasi dalam penelitian kualitatif diperoleh dari pihak ahli yang terkait yang disebut dengan informan. Dari informan peneliti akan mendapatkan informasi dan data yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian (Sugiyono, 2017).

Informan yang akan menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah Pemilih pemula. Sementara *primary informan* yang digunakan adalah pemilih pemula yang sudah pernah melakukan pemilihan secara langsung. Untuk pelengkap data-data yang ingin diperoleh menggunakan informan dari pegawai pada komisi pemilihan umum (KPU). Teknik penentuan jumlah informan menggunakan konsep *snowball sampling*, yaitu memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlahnya, sampai pada akhirnya data yang ingin diperoleh terpenuhi untuk kebutuhan penelitian (Yusuf, 2014).

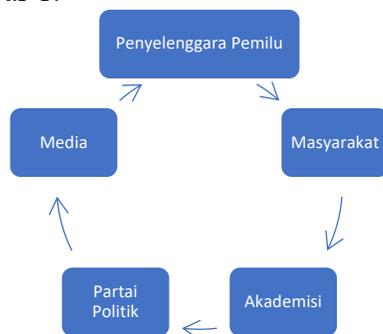
Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah focus group discussion (FGD), dari 6 sekolah yaitu SMKS Sultan Syarif Kasim, SMKS Baitul Rahman, Ponpes

jabalnur, ponpes darus shofa, SMAN 3 Kandis, SMAN 1 Kandis. Setelah data diperoleh dari FGD, dilanjutkan dengan mendeskripsikan hal-hal yang disusun sesuai kebutuhan, kemudian proses pengambilan kesimpulan dan memberikan solusi. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan lengkapnya informasi yang diperoleh di lapangan, akan menentukan pengambilan kesimpulan yang tepat (Sumber: Miles dan Hubberman dalam Yusuf, 2014).

4. Hasil dan Pembahasan

7,4 persen merupakan generasi muda yang memiliki hak pilihnya untuk pertama kali (Armadawati, 2022; Nur, 2020). Jumlah ini tidak sedikit dan dapat berperan penting dalam menentukan kemenangan Pemilu.

Literasi dan Edukasi dalam memilih pemula di kecamatan Kandis, menggunakan model Pentahelix yang ditunjukkan pada gambar 1.



Model pentahelix yang melibatkan stakeholder yakni Penyelenggara pemilu, masyarakat, akademisi, Partai politik dan media. Kelima unsur ini mempunyai peran penting dalam proses suksesnya pemilihan umum.

Penyelenggara pemilu

Penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kabupaten disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) penyelenggara tingkat Kecamatan/desa/lurah disebut dengan Panitia Pemilihan Kecamatan yang dibentuk oleh KPU, penyelenggara pemilu Tempat

Pemungutan Suara (TPS) disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPS bertugas menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. KPPS merupakan singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. KPPS dibentuk oleh PPS untuk melangsungkan pemungutan suara di Tempat Pemungutan suara. Anggota KPPS berjumlah 7 orang, terdiri dari 1 ketua merangkap anggota dan 6 anggota KPSS serta dibantu oleh 2 orang petugas ketertiban dan keamanan TPS.

Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), tingkat kecamatan/Lurah/Desa disebut Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU), Tingkat Tempat Pemungutan suara (TPS) disebut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Penyelenggaraan pilkada di tingkat lokal dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mempunyai integritas, professional dan akuntabilitas yang tinggi serta diikuti oleh masyarakat yang cerdas politik ataupun entitas lainnya seperti perguruan tinggi sebagai *civil society*. Oleh karena itu pemerintah dan perguruan tinggi bisa bermitra untuk menjamin terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, sehingga hak-hak politik masyarakat pada tingkat daerah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya (Yandra, 2021).

Peran penyelenggara pemilu menjadi cermin dalam pelaksanaan pemilu. Tentunya bagaimana perannya dalam memberikan edukasi dan literasi di kecamatan kandis. Penyelenggara pemilu adalah realisasi demokrasi yang akan melahirkan pemimpin legislatif dan eksekutif yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Peran ini

tidak terlepas dari unsur masyarakat sebagai pemilih dan pemilik hak suara. Penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu di kecamatan kandis senantiasa mensosialisasikan dan mengedukasi pemilu melalui di sekolah-sekolah, di masjid, di tempat pengajian, dilokasi perkumpulan pemuda, di media elektronik dengan memberikan literasi dan edukasi cara memilih dan pentingnya pemilihan dilakukan untuk melahirkan sosok tokoh pemimpin di daerahnya yang sesuai dengan harapan masyarakat tentunya. Untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, Penyelenggara pemilu melaksanakan semua tahapan pemilu di tingkat kecamatan kandis sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan.

Masyarakat

Pada prinsipnya kesadaran masyarakat terhadap politik hanya pada saat adanya momentum politik seperti Pemilu, Pilkada Provinsi/ Kabupaten yang sifatnya prosedural. (Yandra, 2021). Sebagian masyarakat di kecamatan kandis tidak terlalu merespon adanya agenda besar Negara yaitu pemilu. Karena masyarakat menganggap pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali tidak berpengaruh terhadap kemajuan perekonomian di daerahnya. Penyelenggara pemilu tentunya terus memberikan stimulus melalui literasi dan edukasi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Baik di kalangan pemilih yang sudah terdaftar maupun di kalangan pemilih pemula. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai obyek pemilu, baik sebagai pengawas maupun sebagai pemilih.

Akademisi

Pemilu tidak boleh dilaksanakan sebagai seremonial lima tahunan semata. Melainkan, harus dimaknai sebagai ikhtiar konstitusional bagi rakyat untuk melakukan suksesi kepemimpinan Nasional secara periodik, dalam rangka mewujudkan cita-cita konstitusi, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam sistem negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki hak untuk menentukan, siapa pemimpin yang akan dipilihnya, untuk mewujudkan amanah konstitusi dan aspirasi rakyat. Oleh karena itulah mengapa proses dalam pemilu dikatakan sebagai pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia, karena di dalam proses pemilulah, rakyat didudukkan pada tempat yang mulia, untuk menentukan nasib perjalanan bangsa, dalam rangka memilih pemimpin di lembaga eksekutif, dan para wakilnya di lembaga legislatif.

Peran akademisi juga merupakan pilar demokrasi dan pemain kunci bagi terselenggaranya pemilu serentak tahun 2024.

Partai Politik

Dalam konteks Pemilihan Umum partisipasi politik adalah unsur dasar bagi terlaksananya suatu demokrasi. Semakin besar jumlah peserta pemilih maka demokrasi seringkali dinyatakan sukses karena menunjukkan kemauan dan kesadaran berpolitik rakyat (Yandra, 2021). Pemilu menjadi wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif, dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Artinya pemilihan umum juga merupakan wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat Nasional. Pemilu yang dilaksanakan di tingkat lokal untuk memilih kepala daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan siapa yang sepatutnya memerintah mereka dan ikut berperan dalam menentukan kebijakan publik di tingkat lokal (Yandra, 2021). Peran partai politik adalah rekrutmen kader pemilih menjadi peserta pemilu. Peran partai politik terhadap masyarakat yakni mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sedangkan peran terhadap media

adalah pengawalan untuk terciptanya pemilu yang jujur, adil dan terbuka serta sosialisasi terhadap masyarakat dan akademis.

Media

Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui. Salah satu manifestasi kedaulatan rakyat adalah pelibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi, dalam hal ini adalah Pemilu. Pemilu juga merupakan medium aktualisasi partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penentuan jabatan politik. Sebagai pemegang kedaulatan, dalam penyelenggaraan Pemilu, masyarakat bukan lagi merupakan obyek yang hanya pasif dan mendapat eksploitasi dukungan dan suaranya. Masyarakat merupakan subyek pemilu yang berperan besar dalam mengawal integritas Pemilu. Peran tersebut salah satunya terjun langsung dalam proses pengawasan Pemilu. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat (Suwari Akhmaddhian dkk, 2021). Perkembangan media digital sangat mendukung dalam literasi dan edukasi terhadap masyarakat. Melalui Iklan di Facebook, youtbe, Instagram, twiter, tiktok. Tentunya pemilu ini juga mengikuti perkembangan teknologi dalam mensosialisasikan pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali, yang akan dilaksanakan 2024 mendatang.

Pada pemilu 2024, Generasi Z termasuk dalam 60% kelompok pemilih bersama dengan generasi milenial. Sebuah survei menunjukkan hanya 4,86% Generasi Z yang golput pada pemilu 2019, namun bukan berarti fakta tersebut dapat diabaikan begitu saja. Apabila isu golput dibumbui dan digoreng dengan narasi yang cenderung negatif atau nakal, tidak menutup kemungkinan tingkat golput akan bertambah dan menguntungkan kepentingan politik pihak tertentu (Saleh Al Hamid, Udin Hamim, 2023).

Literasi dan edukasi bagi pemilih pemula sangat penting, Data pemilih tetap di Kabupaten Siak pada pemilu tahun 2024 berdasarkan generasi. Pra baby boomers 1.959 (kelahiran tahun >1945)/0,60 %. Baby boomers 26.650 (kelahiran tahun 1946-1964)/8,18 %, Generasi X 93.331 (kelahiran 1965-1980)/28,64 %, Milenial 116.333 (kelahiran tahun 1981-1996)/ 35,70%, Generasi Z 87. 575 (kelahiran tahun 1997-2012)/26,88 %.

Hasil Penelitian yang diperoleh dari data FGD, dari 6 sekolah yaitu SMKS Sultan Syarif Kasim, SMKS Baitul Rahman, Ponpes jabalnur, ponpes darus shofa, SMAN 3 Kandis, SMAN 1 Kandis. Di kabupaten Siak terdapat pemilih pemula yang tergolong generasi Z berjumlah 87. 575 (kelahiran tahun 1997-2012)/26,88 %.

Setelah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) diperoleh data bahwa siswa tingkat menengah ke atas sebagai pemilih pemula bertambah pengetahuan tentang pemilu. Siswa tingkat menengah keatas antusias mendengarkan literasi yang disampaikan tim petugas pemilu Kecamatan Kandis. Setelah mendapatkan literasi, siswa selaku pemilih pemula tentunya akan lebih cermat dalam menerima informasi-informasi dari media tentang pemilu. Mencermati informasi yang benar akan pentingnya pemilu. Dari edukasi yang diberikan, pemilih pemula

yang belum terdaftar sebagai pemilih sudah mendaftarkan diri melalui aplikasi online Cek DPT online (Daftar Pemilu Tetap) yang dibantu pengisian datanya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan maupun desa. Pemilih pemula yang sebelumnya belum terdata, setelah diadakan literasi dan edukasi saat ini sudah terdata. Pemilih pemula yang berada di kelurahan Simpang belutu yakni pemilih pemulanya dari data siswa Ponpes Jabal Nur yang sudah terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 15 pemilih pemula. Pemilih pemula yang berada di kelurahan telaga sam sam yakni pemilih pemulanya dari siswa yang bersekolah di SMK Sultan syarif kasim, SMA N 1 Kandis, SMK Baitul Rahman yang sudah terdata di Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 13. Pemilih pemula yang berada di kampung kandis yakni pemilih pemulanya dari data siswa Ponpes darus shofa dan SMK N 3 Kandis yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 18.

Generasi Z yang saat ini melek dengan digital, tentunya juga akan lebih cepat tanggap dalam merespon adanya momentum pemilu, makna pemilu bagi kemajuan suatu Bangsa. Edukasi pemilu ini terbentuknya kesadaran siswa sebagai penerus bangsa, yang mana nantinya menjadi harapan untuk mewujudkan pembangunan bangsa dan negara serta ikut berperan serta dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula melalui spirit literasi politik dan memberikan ikhtiar baru bagi perbaikan kualitas demokrasi dikalangan siswa.

Edukasi pemilu terhadap pemilih pemula memberikan tambahan pemahaman terhadap para siswa mengenai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk membangun bangsanya dengan menggunakan hak politik serta mendapatkan pengetahuan politik yang dapat membentuk mereka sebagai pemilih yang rasional dan kritis. Pendidikan politik (*voter education*), sebagai upaya untuk

meningkatkan literasi politik pemilih pemula, hendaknya dilakukan lebih dini dan dalam durasi waktu yang relatif panjang, sekurang-kurangnya sejak kelas IX dan selama masa belajar di tingkat sekolah menengah atas, dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*).

5. Kesimpulan

Hasil penelitian dengan metode pengambilan data melalui Focus Group Discussion (FGD) diperoleh data bahwa siswa tingkat menengah ke atas sebagai pemilih pemula bertambah pengetahuan tentang pemilu. Siswa tingkat Menengah keatas antusias mendengarkan literasi yang disampaikan tim petugas pemilu Kecamatan Kandis. Setelah mendapatkan literasi, siswa selaku pemilih pemula tentunya akan lebih cermat dalam menerima informasi-informasi dari media tentang pemilu. Mencermati informasi yang benar akan pentingnya pemilu. Dari literasi dan edukasi yang diberikan, pemilih pemula yang belum terdaftar sebagai pemilih sudah mendaftarkan diri melalui aplikasi online Cek DPT online yang dibantu pengisian datanya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan maupun desa. Pemilih pemula yang sebelumnya belum terdata, setelah diadakan literasi dan edukasi saat ini sudah terdata. Pemilih pemula yang berada di kelurahan Simpang belutu yakni pemilih pemulanya dari data siswa Ponpes Jabal Nur yang sudah terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 15 pemilih pemula. Pemilih pemula yang berada di kelurahan telaga sam sam yakni pemilih pemulanya dari siswa yang bersekolah di SMK Sultan syarif kasim, SMA N 1 Kandis, SMK Baitul Rahman yang sudah terdata di Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 13. Pemilih pemula yang berada di kampung kandis yakni pemilih pemulanya dari data siswa Ponpes darus shofa

dan SMK N 3 Kandis yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 18.

6. Daftar Pustaka

- Agatha dkk, (2021), Peta Literasi Media Pemilih Pemula di Surabaya Media Literacy Map for Beginner Voters in Surabaya Universitas Katolik WIIdya Mandala Surabaya, *Jurnal KOMUNIKATIF*, Vol. 10 No. 1 Juli 2021).
- Andi, dkk. (2023). Edukasi Pemilih Rasional dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, Vol 2 No 3
- Andi, dkk. (2023). Program Edukasi Pemilih Rasional Di Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol 5 No 1.
- Anshori, A., & Izharsyah, J. R. (2024). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2).
- Alexander Yandra dkk., (2021). Pendidikan Politik Dan *Civic Culture* Pada Ibu-Ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), *Jurnal Abdine*, Vol 1. No 1.
- Akhyar dkk., (2023). Pemahaman Literasi Politik Pemilih Pemula dalam Upaya Pencegahan Informasi Hoax Pemilu 2024 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 7. No 2.
- Aprianti, N. (2023). Analisis Partisipasi Pemilih Pemula dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Bupati Kerinci di Desa Agung Koto Iman. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(1).
- Bu'ulolo, Yanida. (2021). Membangun Budaya Literasi Di Sekolah, IKIP Gunung Sitoli. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima*, Vol. 3 No. 1
- Darwis, Puspita, Ari, Literasi Informasi Pemilih Pemula Provinsi Banten Pada Berita Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Jurnal Riset Komunikasi*
- Eka, Nora. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu, Universitas Negeri Padang, *Jurnal Agregasi*, Vol. 5 No. 1.
- Fatimah, S., Harsan, T., & Murtiningsih, I. (2023). Penyuluhan Demokrasi Di Indonesia Dan Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu di SMA Warga Surakarta. *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 1(02).
- Grace, dkk., (2023). Edukasi Pemilu 2024 dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif kepada Pemilih Pemula di SMAN 15 Batam. *Jurnal Prosiding National Conference for Community Service Project*. Vol 5 No 1.
- Ihyani, dkk. (2020). Edukasi Politik Virtual Era Demokrasi Digital pada Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Masyarakat Berdaya dan Inovasi*. Vol 1 No 1.
- Meilaty, dkk. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Pelangkian Melalui Edukasi Dan Literasi Keuangan Pasar Modal Menuju Masyarakat Cerdas Berinvestasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*. Vol. 3 No. 1.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1).

- Prasetyo, W. D., Harsan, T., & Pujiyana, P. (2019). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)*, 1(1).
- Rahmat, B., & Esther, E. (2016). Perilaku Pemilih dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2).
- Rohmayani, V., Arimutri, A. R. R., Lukiyono, Y. T., Nuzula, F., Romadhon, N., & Lihabi. (2021). Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2).
- Sartibi, dkk. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 1 No 1.
- Setyowati Karyaningtyas. (2019). Urgensi Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula, *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, Volume 2, Nomor 1.
- Saleh Al Hamid, Udin Hamim. (2023). *Jurnal Pengabdian Pedagogika*, Vol. 01, No. 02, Juni.
- Setyowati, Lis, *Literasi Informasi Dilihat Dari Perspektif Modal Manusia*, UNDIP Semarang, Jawa Tengah.
- Suwari Akhmaddhian, Erga Yuhandra, Yani Andriyani. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, FH PGRI Madiun.
- Ulya Fitri, Novi Budiman and Rio Febrian. (2021). *Partisipasi dan Perilaku Politik Generasi Millennial pada Pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2020 di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas*, *JOELS (Journal of Election and Leadership)*, Vol 2. No. 2.
- Wahyuti, Tri. (2019). Urgensi Literasi Media Digital Bagi Pemilih Pemula Dalam Menghadapi Pemilu 2019, Universitas Paramadina, *Jurnal Konvergensi*, Vol. 01 No. 01.